

ABSTRAK

Ichlasul Noor. *Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Banjir Dikabupaten Hulu Sungai Tengah.* Skripsi, Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H, M.H dan (II) Dr. Wahyuddin, M.Pd.I Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah/UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Pengawasan DPRD, Pemerintah Daerah, Banjir.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kurang optimalnya fungsi pengawasan DPRD sebagai representatif rakyat di daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah, padahal tujuan fungsi Pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah sangat penting, karena fungsi pengawasan salah satu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan di daerah berjalan sesuai dengan rencana, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani permasalahan banjir di daerah, jika tanpa adanya pengawasan maka pelaksanaan pemerintah di daerah tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Pemerintah Daerah dalam menangani banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan mengetahui upaya dari DPRD kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pemerintah Daerah dalam menangani banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Subjek penelitian adalah ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi wawancara bersama responden, dokumentasi data, dan kejadian banjir tahun 2021, 2022, dan 2023. Selanjutnya data yang telah terkumpul diolah melalui proses editing dan klasifikasi serta dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini, Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Bencana Banjir Dikabupaten Hulu Sungai Tengah, karena disebabkan keadaan darurat, maka pengawasan banjir tidak bisa dilakukan dengan ketat dan maksimal dan kuarangnya anggaran, maka fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dan fungsi pengawasan terhadap tahapan dalam menangani banjir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masih kurang. Upaya terbesar yang telah dilakukan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ialah pembangunan kolam regulasi beserta rencana pembangunan bendungan. Kolam regulasi berfungsi menampung air yang turun dari gunung dan ditampung supaya jangan sampai turun ke kota Barabai. Upaya belum dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang diminta masyarakat adalah perbaikan saluran-saluran air dan masih adanya pengendapan lumpur di lahan pertanian, dengan demikian, untuk penanganan banjir kedepannya diharapkan maksimal.